

Reaktivitas Pemerintah terhadap Isu Viral di Era Digital: Studi Kasus Kebijakan Responsif atas Tagar #KaburAjaDulu di Indonesia

Hila Lailatul Qodriyah

Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia,
hilalailatulq@gmail.com

Keywords:

*Viral-based policy,
 Social Media,
 Government
 reactivity*

Abstract: *This study aims to analyze the government's reactive pattern in responding to viral public issues on social media, using the hashtag #KaburAjaDulu as a case study. The research employs a descriptive qualitative approach with an intrinsic case study design and content analysis techniques. Data were collected through digital documentation and media observation. The findings reveal that the hashtag's virality reflects the collective anxiety of young citizens over socioeconomic conditions. Government responses were reactive, uncoordinated, and tended to focus on symbolic gestures rather than structural solutions. The public responded critically through digital media, reinforcing the role of online platforms as a mechanism for policy evaluation. The study concludes that Viral-based policy has become a new trend in the digital era, though it risks undermining principles of participatory, evidencebased, and sustainable governance.*

Keywords:

*Viral-based policy,
 Media Sosial,
 Reaktivitas
 pemerintah*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola reaktivitas pemerintah terhadap isu publik yang viral di media sosial, dengan studi kasus tagar #KaburAjaDulu. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus intrinsik dan teknik analisis isi. Data dikumpulkan melalui dokumentasi digital dan observasi media daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas tagar tersebut merepresentasikan keresahan kolektif masyarakat muda terhadap kondisi sosial-ekonomi. Respons pemerintah bersifat reaktif, tidak terkoordinasi, dan lebih berorientasi pada simbolisme daripada solusi struktural. Publik memberikan reaksi balik yang tajam melalui media sosial, memperkuat peran digital sebagai mekanisme evaluasi kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Viral-based policy telah menjadi pola kebijakan baru di era digital, namun berpotensi melemahkan prinsip tata kelola yang partisipatif, berbasis data, dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Kebijakan publik idealnya disusun melalui mekanisme teknokratis yang mengutamakan rasionalitas, analisis kebutuhan objektif, serta perencanaan jangka panjang berbasis data. Namun, dalam praktik tata kelola di Indonesia kontemporer, pola

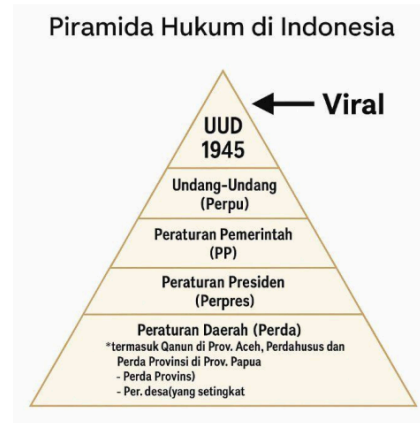
pengambilan kebijakan semakin menunjukkan kecenderungan responsif terhadap tekanan sosial di ruang digital (Nurlatifah & Najicha, 2024). Fenomena ini dikenal sebagai Viral-based policy, yakni kebijakan yang muncul sebagai reaksi terhadap isu viral di media sosial, bukan karena urgensi yang diidentifikasi melalui proses evaluatif dan evidencebased policy.

Transformasi ruang digital menjadi arena diskursus publik semakin nyata dengan tingginya tingkat partisipasi digital masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan Digital 2024: Indonesia dari We Are Social dan Meltwater, sebanyak 83,1% pengguna internet di Indonesia menggunakan internet untuk mencari informasi, dengan rata-rata durasi penggunaan mencapai 7 jam 38 menit per hari (GoodStats, 2024). Pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 139 juta orang, atau 49,9% dari total populasi nasional (We Are Social, 2024). Hal ini menegaskan bahwa media sosial telah menjadi kanal utama dalam menyampaikan aspirasi, memperjuangkan isu, serta membentuk tekanan kolektif terhadap pengambilan kebijakan.

Dalam konteks tersebut, media sosial menjadi bagian dari E-participation, yaitu bentuk keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan melalui teknologi digital (United Nations, 2014). E-participation meliputi penyediaan informasi, konsultasi daring, hingga partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun, partisipasi digital di Indonesia sering kali bersifat spontan dan emosional, sehingga menimbulkan respons kebijakan yang bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan secara struktural.

Kritik terhadap disfungsi sistem kebijakan yang terlalu reaktif terhadap tekanan viral direpresentasikan dalam berbagai simbol budaya digital. Salah satunya adalah meme politik berjudul "Piramida Hukum Indonesia" yang viral pada akhir tahun 2024, yang menggambarkan hierarki hukum Indonesia dengan menempatkan elemen "Viral" di puncak tertinggi, bahkan melampaui UUD 1945. Visual ini menyampaikan satir terhadap kondisi di mana viralitas dianggap lebih menentukan dibanding kerangka hukum dan prosedural formal.

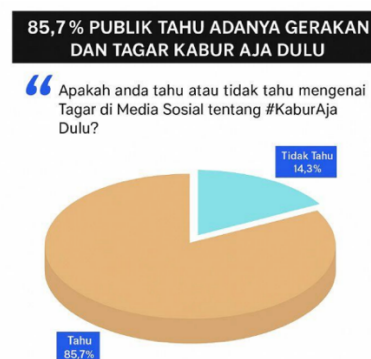
**Gambar 1. Satir "Piramida Hukum Indonesia" yang Dipengaruhi oleh
 Viralitas Digital**



Sumber: Website Economica.id (2024)

Kasus paling aktual yang mencerminkan fenomena ini adalah viralnya tagar #KaburAjaDulu pada Februari 2025. Tagar ini muncul sebagai bentuk keresahan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap kondisi sosial dan ekonomi nasional. Survei dari Lembaga Median yang dipublikasikan oleh Republika.co.id menunjukkan bahwa 85,7% responden memahami makna tagar tersebut, yang menandakan kuatnya resonansi sosial dari gerakan digital ini. Ungkapan keresahan yang muncul dalam berbagai format baik teks, video, hingga meme menjadi bentuk E-participation yang mampu menggeser diskursus publik dan menarik perhatian media serta elite politik nasional.

Gambar 2. Hasil Survei, Mayoritas Responden Setuju Tagar #KaburAjaDulu



Sumber: Website Republika.co.id (2025)

Respons pemerintah terhadap isu ini muncul secara cepat, yang mencerminkan pola reaktivitas khas Viral-based policy. Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan akan membuka akses kerja di luar negeri sebagai respons terhadap keresahan yang muncul, sementara pejabat lain memberikan pernyataan yang justru menimbulkan kritik baru. Respon-respon ini menandakan adanya ketergantungan elite politik terhadap opini publik digital dan viralitas isu, bukan pada kajian mendalam atas permasalahan sosial dan ekonomi yang melatarbelakanginya.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan teori agenda-setting dari (Schafran & Weinberger, 2011), yang menyatakan bahwa media memiliki kekuatan dalam menentukan fokus perhatian publik. Dalam konteks media sosial, publik tidak hanya menjadi objek agenda-setting, tetapi juga pelaku aktif yang membentuk eksposur isu. Teori mediatization of politics (Van Aelst et al., 2014) juga menunjukkan bahwa pengambil kebijakan semakin mempertimbangkan eksposur media sebagai dasar utama dalam menetapkan kebijakan. Amanda Tan, kandidat doktor dari Monash University, bahkan menyatakan bahwa viralitas kini telah berfungsi sebagai "heuristik kebijakan" dalam birokrasi Indonesia, yakni ukuran cepat untuk menentukan mana isu yang layak ditanggapi tanpa proses evaluasi berbasis bukti.

Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini mengkaji bagaimana pola reaktivitas pemerintah dalam merespons isu viral di media sosial, dengan mengambil studi kasus tagar #KaburAjaDulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, aktor kunci, serta implikasi tata kelola publik dalam era mediatik digital. Dengan demikian, studi ini penting untuk memahami dinamika antara tekanan digital dengan proses pengambilan kebijakan publik kontemporer.

Tinjauan Literatur

Konsep dan Teori yang Relevan

Viral-based policy

Konsep Viral-based policy merujuk pada pola pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah sebagai respons terhadap isu-isu yang menjadi viral di media sosial, bukan melalui mekanisme evaluatif berbasis data. Istilah ini berkembang dari

fenomena empirik dalam tata kelola pemerintahan digital, di mana tekanan publik di ruang maya dapat menggeser prioritas kebijakan negara secara signifikan. Media sosial menjadi kanal desakan horizontal, yang dapat membentuk narasi kebijakan melalui indikator popularitas seperti trending topic, komentar massal, hingga petisi digital (Zur & Hatuka, 2023).

E-participation

United Nations (2014) mendefinisikan E-participation sebagai bentuk keterlibatan warga negara dalam proses kebijakan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi. Bentuknya mencakup tiga level: (1) e-information, yaitu akses warga terhadap informasi kebijakan; (2) e-consultation, yaitu komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga; serta (3) e-decision making, yaitu pelibatan aktif warga dalam pembuatan keputusan publik. Dalam konteks Indonesia, partisipasi digital telah berkembang pesat, namun masih didominasi oleh ekspresi spontan dan emosional yang belum terstruktur secara sistemik dalam proses kebijakan.

Agenda-Setting Theory

Teori agenda-setting pertama kali diperkenalkan oleh McCombs dan Shaw (1972), yang menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk memengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Dalam versi klasiknya, media tidak memberi tahu publik apa yang harus dipikirkan, tetapi apa yang harus dipikirkan tentang apa. Dalam konteks digital saat ini, media sosial menggantikan fungsi media konvensional sebagai produsen narasi dan agenda isu. Eksposur tinggi terhadap suatu isu di ruang digital meningkatkan kemungkinan isu tersebut masuk ke dalam agenda kebijakan.

Mediatization of Politics

Van Aelst (2014) menjelaskan bahwa dalam era digital, politik telah mengalami proses mediatization, yaitu perubahan cara kerja politik yang mengikuti logika media. Dalam kerangka ini, aktor politik akan lebih cenderung menanggapi isu yang memiliki potensi viral karena dianggap mampu membentuk persepsi publik secara cepat. Konsekuensinya, keputusan kebijakan seringkali lebih berorientasi pada citra dan respons emosional ketimbang analisis rasional dan jangka panjang.

Penelitian Terdahulu dan Pernyataan Kebaruan

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan erat antara media sosial dengan perubahan arah kebijakan publik. Studi oleh Kurniadi dan Gunawan (2021) menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia bersikap sangat reaktif terhadap tekanan publik di media sosial. Penelitian ini mengungkap bahwa lemahnya strategi komunikasi publik pemerintah menyebabkan kebijakan menjadi inkonsisten dan tidak sistemik.

Penelitian lain oleh Wibowo dan Puspita (2023) mengkaji hashtag activism dalam isu lingkungan. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun viralitas dapat meningkatkan perhatian pemerintah terhadap isu tertentu, tidak semua gerakan digital berhasil diakomodasi dalam kebijakan formal. Studi ini menekankan pentingnya konsistensi antara respon awal pemerintah dan tindak lanjut kebijakan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Amanda Tan dalam (Economica.id, 2024) mengemukakan bahwa viralitas kini digunakan sebagai "heuristik kebijakan" oleh aktor negara, yaitu sebagai alat ukur cepat untuk menentukan urgensi suatu isu. Namun, pernyataan ini belum banyak diteliti secara empiris dan belum digunakan sebagai basis untuk mengevaluasi pola sistemik kebijakan berbasis viralitas.

Adapun studi Van Aelst et al., (2014) yang membahas mediatization and political agenda-setting masih didasarkan pada konteks negara-negara Barat, sehingga aplikasinya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia belum banyak dikaji. Oleh karena itu, masih terdapat kekosongan kajian dalam literatur yang secara langsung menghubungkan viralitas digital dengan pergeseran pola kebijakan publik secara sistemik di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memperlakukan Viral-based policy sebagai fenomena struktural dan bukan hanya kasus-kasus insidental. Studi ini juga memperluas cakupan teori agenda-setting dan mediatization dengan mengadaptasikannya ke dalam konteks sosiopolitik Indonesia, melalui studi kasus konkret yang belum pernah dianalisis secara akademik sebelumnya, yakni #KaburAjaDulu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014), yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara mendalam pengalaman, makna, dan fenomena sosial dalam konteks aslinya tanpa manipulasi variabel. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara kontekstual pola reaktivitas pemerintah terhadap isu publik yang viral di media sosial, khususnya dalam dinamika kebijakan publik digital di Indonesia.

Desain Penelitian

Desain yang digunakan adalah studi kasus intrinsik, sebagaimana dikemukakan oleh Yin (2018), yang cocok digunakan ketika peneliti ingin meneliti secara mendalam suatu kasus yang memiliki keunikan dan nilai intrinsik tinggi. Studi ini menyoroti fenomena viral tagar #KaburAjaDulu sebagai kasus tunggal yang mencerminkan pola Viral-based policy di Indonesia, sehingga fokus utama diarahkan pada konteks, aktor, dan bentuk respons kebijakan terhadap tekanan digital tersebut.

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian bersifat virtual dan digital, karena sumber data utama berasal dari platform media sosial (Twitter/X, TikTok, Instagram) dan pemberitaan media daring nasional (Republika.co.id, Kompas.com, Bisnis.com, dan Liputan6.com). Objek penelitian ini adalah respons pemerintah pusat terhadap tekanan viral tagar #KaburAjaDulu, yang dianalisis sebagai manifestasi dari dinamika kebijakan reaktif di era digital.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dokumentasi digital dan observasi konten media sosial, mencakup:

- a. Dokumentasi pemberitaan daring dari media arus utama mengenai tanggapan pejabat negara terhadap viralnya tagar #KaburAjaDulu.
- b. Observasi unggahan publik di media sosial yang menggunakan tagar tersebut, termasuk bentuk narasi, media visual, serta intensitas penyebaran isu.
- c. Pernyataan resmi dari pemerintah, baik berupa konferensi pers, siaran pers, maupun kutipan dari wawancara yang relevan.

Sumber data dipilih secara purposif dan dibatasi pada periode Februari hingga Maret 2025, saat tagar ini mencapai puncak viralitas.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi kualitatif (qualitative content analysis), mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi data: menyaring dan memilah data yang relevan dari media daring dan platform digital.
- b. Kategorisasi tematik: mengelompokkan temuan berdasarkan tema seperti bentuk tanggapan pemerintah, waktu respons, motif kebijakan, dan persepsi publik.
- c. Analisis interpretatif: menafsirkan data dengan mengacu pada kerangka teoritik utama, yaitu:
 - 1) Teori Agenda-Setting (McCombs & Shaw, 1972) untuk menganalisis bagaimana media sosial membentuk fokus kebijakan.
 - 2) Teori Mediatization of Politics (Van Aelst et al., 2014) untuk menilai sejauh mana logika media mempengaruhi perilaku aktor kebijakan.
 - 3) Konsep E-participation (United Nations, 2014) untuk menilai bentuk partisipasi digital dalam proses kebijakan publik.
- d. Penarikan kesimpulan: menyusun pola reaktivitas kebijakan berdasarkan hasil interpretasi yang sistematis.

Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori:

- a. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan isi dari media sosial, pernyataan pemerintah, dan berita daring dari berbagai sumber yang kredibel.
- b. Triangulasi teori dilakukan dengan mengkaji konsistensi data terhadap teori-teori utama yang digunakan dalam penelitian ini.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat dan kritis tentang bagaimana pemerintah Indonesia merespons isu-isu viral di ruang digital, serta implikasinya terhadap tata kelola kebijakan publik di era mediatik.

Hasil Penelitian

Viralitas Tagar #KaburAjaDulu sebagai Representasi Keresahan Digital

Penelitian ini menemukan bahwa tagar #KaburAjaDulu merupakan bentuk ekspresi digital yang muncul sebagai respons masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap berbagai ketidakpastian sosial-ekonomi yang terjadi secara struktural. Fenomena ini tidak sekadar menjadi tren daring, melainkan mengandung narasi sosial yang kompleks dan kolektif meliputi kekecewaan terhadap tingginya biaya hidup, sulitnya akses kerja layak, hingga minimnya prospek masa depan yang dirasa menjanjikan di dalam negeri.

Penyebaran tagar ini berlangsung masif dan lintas platform, mulai dari Twitter (X) sebagai pemantik utama, kemudian merambat ke TikTok, Instagram, dan Facebook. Konten yang disebarakan mencakup bentuk tulisan naratif, video, meme satir, hingga visualisasi kreatif yang menyindir realitas sosial-politik Indonesia. Narasi "ingin kabur ke luar negeri" menjadi simbol dari harapan dan sekaligus keputusan generasi muda terhadap negara, yang dirasa gagal menyediakan masa depan yang layak.

Tagar ini juga menunjukkan karakteristik E-participation dalam bentuk nonformal. Masyarakat secara spontan dan kolektif membangun wacana publik melalui ruang digital, tanpa melalui mekanisme partisipasi kelembagaan seperti forum warga atau musyawarah. Dalam konteks ini, partisipasi digital tidak hanya sebagai ekspresi individu, tetapi menjadi desakan horizontal terhadap elite pengambil keputusan. Bentuk konten yang mendominasi sebagian besar unggahan menggunakan pendekatan satir, sarkastik, atau humor gelap, yang menggambarkan pengalaman nyata sekaligus membangun kesadaran kritis secara masif. Unggahan-unggahan tersebut menjadi refleksi dari keresahan kolektif terhadap kondisi struktural yang belum terselesaikan oleh kebijakan publik.

Respons Pemerintah terhadap Tekanan Digital Tagar #KaburAjaDulu

Respons pemerintah terhadap viralitas tagar #KaburAjaDulu memperlihatkan pola reaktivitas yang muncul setelah isu tersebut memperoleh atensi luas dari publik dan media. Reaksi pertama kali muncul dari pihak eksekutif setelah beberapa hari tagar ini

menjadi trending topic nasional, yang menandakan bahwa pengambil kebijakan mulai merespons setelah tekanan digital mencapai ambang eksposur tertentu.

Pemerintah dalam hal ini menunjukkan kecenderungan untuk merespons isu publik bukan berdasarkan deteksi awal terhadap dinamika sosial yang berkembang, melainkan berdasarkan intensitas viralitas yang muncul secara daring. Pola ini menggambarkan kecenderungan pengambilan kebijakan yang tidak proaktif, melainkan reaktif dan berbasis persepsi publik digital. Hal ini sesuai dengan ciri utama dari Viralbased policy, di mana pemicu kebijakan bukan berasal dari evaluasi data atau analisis sistemik, tetapi dari tekanan horizontal berbasis popularitas isu di media sosial.

Tanggapan yang muncul dari beberapa pejabat pemerintah menunjukkan variasi dalam bentuk, substansi, dan kedalaman respons. Salah satu bentuk respons yang menonjol adalah pernyataan simbolik yang mencoba mengakomodasi keresahan publik, misalnya dengan menyampaikan komitmen untuk membuka peluang kerja di luar negeri. Namun, pernyataan tersebut tidak diikuti dengan uraian kebijakan konkret mengenai perbaikan struktural dalam sektor ketenagakerjaan di dalam negeri.

Sebaliknya, terdapat pula respons yang bersifat normatif dan terkesan mengabaikan substansi isu. Beberapa pejabat publik memberikan pernyataan yang lebih menekankan pada pencitraan atau mengalihkan fokus dari isu utama, seperti menyarankan masyarakat untuk "jalan-jalan di Indonesia saja, jangan kabur" atau menyatakan bahwa keresahan itu adalah hal yang "wajar" di masa transisi pemerintahan. Pernyataan-pernyataan semacam ini justru menjadi bahan sindiran lanjutan dari publik, yang menyebar kembali dalam bentuk meme dan kritik tajam di media sosial.

Selain itu, tidak terdapat kejelasan koordinasi lintas lembaga dalam merespons fenomena ini. Setiap pejabat atau institusi memberikan pernyataan masing-masing tanpa satu narasi yang terstruktur atau strategi komunikasi yang terpadu. Ketidakterpaduan ini memperkuat kesan bahwa respons pemerintah tidak berasal dari mekanisme kebijakan yang terintegrasi, melainkan sebagai reaksi individual atas tekanan eksposur publik di ruang digital.

Temuan ini memperkuat asumsi bahwa pengambilan keputusan atau minimal respons institusional terhadap isu publik saat ini sangat dipengaruhi oleh intensitas

viralitas isu di media sosial. Pemerintah lebih sensitif terhadap sinyal dari ruang publik digital dibandingkan terhadap instrumen perencanaan, pengawasan, atau masukan kelembagaan. Akibatnya, respons yang dihasilkan cenderung bersifat jangka pendek, simbolik, dan tidak menyentuh akar persoalan secara substansial.

Dampak dan Reaksi Balik Publik terhadap Respons Pemerintah

Respons pemerintah terhadap tagar #KaburAjaDulu tidak serta-merta meredam keresahan publik, justru dalam banyak hal menimbulkan gelombang kritik baru. Reaksi balik masyarakat, terutama di media sosial, menunjukkan bahwa publik tidak puas dengan pernyataan-pernyataan pejabat yang dianggap normatif, tidak solutif, dan kurang empatik terhadap realitas yang dihadapi generasi muda. Ruang digital kembali menjadi arena ekspresi kekecewaan, bahkan berkembang menjadi ruang evaluasi terbuka terhadap kualitas komunikasi publik pejabat negara.

Publik tidak hanya menanggapi secara verbal melalui komentar, balasan, atau utas, tetapi juga menciptakan konten kreatif lanjutan berupa meme, video parodi, hingga kampanye digital alternatif. Kritik terhadap pemerintah mengalami re-framing menjadi sindiran yang lebih tajam, dengan menyasar pernyataan pejabat yang dianggap mengabaikan substansi persoalan. Narasi seperti "jalan-jalan di Indonesia saja, jangan kabur" atau "wajar jika banyak yang ingin pergi" ditanggapi dengan respons satir dalam berbagai bentuk digital, memperkuat kembali siklus viralitas.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi kebijakan, melainkan juga bertindak sebagai produsen dan pengoreksi narasi resmi negara. Dalam konteks ini, media sosial tidak lagi sekadar menjadi medium komunikasi satu arah, tetapi berfungsi sebagai sistem umpan balik yang bersifat instan, masif, dan berkelanjutan. Reaksi publik dalam bentuk evaluasi digital ini menjadi bukti bahwa kebijakan atau pernyataan pejabat publik kini langsung diuji validitasnya oleh opini publik online.

Di sisi lain, reaksi balik publik yang kuat terhadap respons pemerintah memperlihatkan adanya pergeseran peran lembaga pengawasan dan penyeimbang. Jika dalam sistem demokrasi konvensional pengawasan kebijakan dilakukan oleh lembaga legislatif atau lembaga pengawas internal, maka dalam konteks digital saat ini, publik

melalui media sosial memiliki kekuatan baru sebagai aktor pengontrol legitimasi kebijakan. Dampak dari respons-respons simbolik pemerintah yang kurang menyentuh akar persoalan menyebabkan semakin luasnya jarak psikologis antara negara dan warganya. Persepsi bahwa pemerintah hanya akan peduli jika suatu isu viral memperkuat sinisme publik terhadap mekanisme perencanaan dan implementasi kebijakan.

Masyarakat mulai membentuk asumsi bahwa untuk mendapatkan perhatian pemerintah, isu tersebut harus terlebih dahulu menjadi viral, bukan disampaikan melalui mekanisme partisipatif resmi. Secara keseluruhan, reaksi balik publik dalam kasus ini bukan hanya menjadi pengulangan dari pola kritik digital sebelumnya, tetapi juga memperlihatkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memproduksi opini kebijakan secara mandiri. Publik tidak sekadar merespons, tetapi juga mendefinisikan ulang posisi mereka dalam proses kebijakan sebagai aktor yang berdaya dan partisipatif melalui kanal digital.

Implikasi Terhadap Tata Kelola dan Arah Kebijakan Publik

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pola respons pemerintah terhadap isu viral di media sosial membawa dampak serius terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan orientasi kebijakan publik di Indonesia. Ketika eksposur digital menjadi pendorong utama dalam pengambilan kebijakan, maka struktur kelembagaan negara cenderung tergeser oleh logika popularitas, bukan oleh prinsip perencanaan, partisipasi substantif, dan evaluasi berbasis data. Pergeseran ini mengarah pada disorientasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keputusan yang semestinya dibentuk melalui proses konsultasi teknokratik dan analisis sistemik, justru kerap dilahirkan secara instan sebagai respons terhadap tekanan viral. Situasi ini tidak hanya menurunkan kualitas substansi kebijakan, tetapi juga merusak fondasi good governance, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan.

Ketergantungan terhadap viralitas menyebabkan pemerintah kehilangan mekanisme proaktif dalam menyusun kebijakan. Negara menjadi reaktif dan terjebak dalam pola "pemadam kebakaran", yakni merespons tekanan hanya ketika sudah mencuat secara digital. Akibatnya, perencanaan jangka panjang terganggu oleh siklus isu-isu viral

yang bersifat fluktuatif dan emosional. Dalam jangka panjang, pola ini dapat merusak legitimasi negara di mata publik, karena pemerintah dinilai tidak memiliki arah kebijakan yang jelas dan berkelanjutan.

Di sisi lain, respons pemerintah yang terlalu berorientasi pada persepsi digital juga melemahkan posisi pakar, akademisi, serta mekanisme evaluasi kelembagaan internal. Keputusan yang biasanya memerlukan validasi ilmiah dan analisis risiko, kini dapat dibentuk berdasarkan trending topic dan tekanan opini publik yang belum tentu representatif. Hal ini meningkatkan risiko populisme kebijakan yang mengutamakan citra dan penerimaan jangka pendek, daripada solusi jangka panjang yang menyentuh akar permasalahan. Implikasi berikutnya adalah tergesernya ruang deliberatif formal dalam proses pembuatan kebijakan. Ketika media sosial menjadi arena utama pembentukan opini dan desakan publik, forum-forum partisipatif seperti musrenbang, konsultasi publik, maupun audiensi resmi menjadi kurang relevan. Publik lebih memilih kanal digital karena dinilai lebih cepat, lebih luas, dan langsung berdampak terhadap perhatian pemerintah.

Namun demikian, kekuatan digital tersebut juga membawa tantangan tersendiri. Partisipasi publik yang masif di ruang maya tidak selalu terstruktur, tidak mewakili semua golongan, dan rentan dipengaruhi oleh emosi serta disinformasi. Jika tidak dikelola secara strategis, pola ini dapat menciptakan kebijakan yang inkonsisten, reaktif, dan tidak berdasar pada kebutuhan faktual masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola reaktivitas pemerintah terhadap isu viral, seperti dalam kasus #KaburAjaDulu, merupakan indikator nyata dari pergeseran paradigma dalam tata kelola kebijakan publik Indonesia. Negara kini berada dalam tekanan untuk tetap responsif terhadap dinamika ruang digital, namun pada saat yang sama dituntut untuk mempertahankan integritas sistem kebijakan berbasis bukti dan prinsip good governance. Keseimbangan antara keduanya menjadi tantangan utama dalam pembangunan tata kelola yang adaptif, namun tetap rasional dan berorientasi jangka panjang.

Diskusi

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama terkait bagaimana pola reaktivitas pemerintah dalam merespons isu viral di media sosial, dengan studi kasus tagar #KaburAjaDulu. Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, diskusi ini menguraikan interpretasi hasil melalui lensa teoritik dan literatur yang relevan, sekaligus merefleksikan implikasi temuan bagi tata kelola kebijakan publik di era digital.

Viralitas sebagai Mekanisme Baru Agenda Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas tagar #KaburAjaDulu menjadi katalis utama dalam mengangkat isu keresahan generasi muda ke dalam wacana kebijakan publik. Temuan ini sejalan dengan teori agenda-setting oleh McCombs dan Shaw (1972) yang menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan fokus perhatian publik dan pemerintah. Namun, dalam konteks ini, media sosial menggantikan posisi media konvensional, dan masyarakat menjadi aktor aktif dalam menciptakan agenda melalui konten digital. Ini menunjukkan bahwa proses pembentukan agenda kini tidak lagi bersifat top-down, melainkan terjadi secara horizontal dan masif.

Mediatization Politik dan Respons Simbolik Pemerintah

Respons pemerintah terhadap tagar viral tersebut memperlihatkan pola reaktivitas berbasis eksposur media, bukan pada urgensi faktual yang ditentukan melalui mekanisme evaluatif. Hal ini menguatkan teori mediatization of politics yang dikemukakan oleh Van Aelst et al. (2014), bahwa aktor politik cenderung mengikuti logika media untuk mempertahankan legitimasi, citra, dan eksistensi politik. Dalam konteks ini, keputusan atau pernyataan yang muncul dari pejabat publik lebih bersifat simbolik, normatif, dan diarahkan untuk meredakan tekanan media sosial, alih-alih mengatasi akar masalah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sistem deteksi awal terhadap aspirasi publik yang berkembang di luar jalur institusional. Respons yang muncul cenderung bersifat instan, tidak terkoordinasi antar instansi, dan minim strategi komunikasi terpadu. Temuan ini memperkuat studi Kurniadi dan Gunawan (2021) yang menyebutkan bahwa lemahnya strategi komunikasi publik selama krisis berdampak pada kebijakan yang tidak sistemik.

Partisipasi Digital yang Kuat tapi Tak Terstruktur

Temuan lain menunjukkan bahwa publik kini tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pengoreksi dan penggerak narasi melalui E-participation. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh UN (2014), E-participation yang ideal mencakup keterlibatan pada tahap informasi, konsultasi, dan pengambilan keputusan.

Dalam kasus ini, partisipasi digital publik lebih dominan pada ekspresi spontan dan emosional yang tidak terhubung langsung dengan mekanisme formal pengambilan keputusan. Kondisi ini sejalan dengan studi Wibowo dan Puspita (2023) yang menunjukkan bahwa aktivisme digital mampu mendorong respons pemerintah, tetapi belum mampu mengarah pada perubahan kebijakan yang berkelanjutan. Artinya, kekuatan viralitas memang efektif dalam mengintervensi agenda kebijakan, tetapi tidak selalu efektif dalam mendorong reformasi struktural yang nyata.

Implikasi terhadap Tata Kelola dan Good Governance

Pergeseran paradigma kebijakan dari evidence-based policy ke Viral-based policy berimplikasi langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan. Ketika respons pemerintah lebih ditentukan oleh opini viral, maka prinsip good governance seperti partisipasi substansial, transparansi, dan akuntabilitas berisiko tereduksi menjadi sekadar pengelolaan persepsi. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap jalur partisipatif resmi dan melemahkan kelembagaan representatif.

Temuan ini juga mengkonfirmasi pernyataan Amanda Tan (2024) yang menyebut viralitas sebagai heuristik kebijakan yakni ukuran cepat untuk menilai penting atau tidaknya suatu isu bagi pengambil keputusan. Akan tetapi, jika dibiarkan tanpa mekanisme korektif berbasis data dan evaluasi, pola ini dapat melahirkan kebijakan populis yang tidak berpijak pada kebutuhan jangka panjang.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, fokus penelitian hanya pada satu kasus viral (#KaburAjaDulu) sehingga generalisasi terhadap semua fenomena viral lainnya belum dapat dilakukan. Kedua, data yang digunakan berbasis observasi digital dan dokumentasi media, tanpa wawancara langsung dengan aktor kebijakan atau analisis media sosial, yang bisa memberikan perspektif lebih mendalam. Ketiga, analisis

hanya berfokus pada tingkat pemerintah pusat, padahal dinamika respons mungkin berbeda pada tingkat pemerintah daerah yang juga rentan terpengaruh oleh tekanan viral.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk memperluas pemahaman terhadap fenomena Viral-based policy, diperlukan studi lanjutan yang:

- 1) Menganalisis lebih dari satu kasus viral yang berdampak pada kebijakan berbeda.
- 2) Melibatkan wawancara mendalam dengan aktor birokrasi dan pembuat kebijakan.
- 3) Menggunakan pendekatan kuantitatif seperti analisis sentimen atau network analysis untuk mengukur dampak viralitas secara lebih terukur.
- 4) Meneliti kapasitas institusi pemerintah dalam menyerap partisipasi digital secara sistematis ke dalam proses pembuatan kebijakan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa pola reaktivitas pemerintah Indonesia terhadap isu publik di era digital mengalami pergeseran signifikan, dari yang sebelumnya berbasis pada evaluasi teknokratik dan bukti empiris, menjadi lebih responsif terhadap tekanan sosial yang muncul di ruang digital. Melalui studi kasus viralitas tagar #KaburAjaDulu, ditemukan bahwa viralitas isu di media sosial berfungsi sebagai katalis utama dalam mendorong respons kebijakan, meskipun tidak selalu berujung pada solusi yang substantif atau sistemik.

Pertama, viralitas tagar tersebut menunjukkan adanya keresahan kolektif masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap kondisi sosial-ekonomi yang tidak menentu. Media sosial berperan sebagai saluran ekspresi dan ruang desakan horizontal yang memproduksi narasi kebijakan secara mandiri. Kedua, respons pemerintah terhadap tekanan digital bersifat reaktif dan tidak terkoordinasi, dengan kecenderungan mengedepankan simbolisme dan pencitraan, alih-alih kebijakan berbasis data. Ketiga, reaksi balik dari masyarakat terhadap respons yang dianggap normatif menunjukkan

semakin tingginya daya kontrol publik melalui media sosial, yang bertindak sebagai mekanisme korektif baru di luar jalur kelembagaan.

Secara teoritik, temuan ini memperkuat pandangan agenda-setting dan mediatization of politics, serta menunjukkan bahwa E-participation di Indonesia masih dominan pada level ekspresi emosional dan belum terintegrasi ke dalam mekanisme formal kebijakan. Situasi ini menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, partisipasi inklusif, dan akuntabilitas kebijakan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru dalam tata kelola digital yang mampu menampung partisipasi publik secara lebih sistemik, tanpa mengorbankan substansi kebijakan demi merespons opini viral. Pemerintah perlu membangun sistem monitoring digital yang berbasis data, memperkuat kanal partisipasi resmi yang adaptif terhadap aspirasi daring, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam memilah antara sinyal viralitas dan urgensi kebijakan yang sesungguhnya.

Daftar Pustaka

- Amanda Tan. (2024). Viralitas sebagai heuristik kebijakan: Studi tentang politik responsif di era digital. *Economica.id*. <https://www.economica.id/viralitas-sebagaiheuristik-kebijakan>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- GoodStats. (2024). Digital Indonesia 2024: Durasi, tren, dan perilaku pengguna internet. <https://goodstats.id/article/rata-rata-penggunaan-internet-di-indonesia-capai7-jam-38-menit>
- Kurniadi, A., & Gunawan, D. (2021). Content analysis of social media: Public and government response to COVID-19 in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 9(1), 55–67.
- McCombs, M., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- Nurlatifah, K., & Najicha, F. U. (2024). Politik responsif dan media sosial: Kajian awal fenomena Viral-based policy di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Digital*, 2(1), 45–60.

- Republika.co.id. (2025). Survei Median: 85,7% responden tahu #KaburAjaDulu.
<https://republika.co.id/berita/tagar-kaburajadulu-dipahami-857-persen>
- Schafran, A., & Weinberger, R. (2011). Media, mobility and the making of metropolitan inequality: Agenda-setting in urban transportation policy. Urban Studies Working Paper.
- United Nations. (2014). United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want. Department of Economic and Social Affairs.
<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-GovernmentSurvey-2014>
- Van Aelst, P., Strombach, J., Aalberg, T., Esser, F., de Vreese, C., Matthes, J., Hopmann, D. N., Salgado, S., Hube, N., & Stepinska, A. (2014). Mediatization and political agenda setting: Changing issue priorities? *Journalism Studies*, 15(3), 282–298.
- We Are Social & Meltwater. (2024). Digital 2024: Indonesia.
<https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Wibowo, A., & Puspita, F. (2023). Hashtag activism dan respons kebijakan: Studi kasus kampanye digital isu lingkungan. *Jurnal Kebijakan Publik Digital*, 5(2), 115–130.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zur, H., & Hatuka, T. (2023). Viral democracy: Online petitions, digital activism, and participatory governance. *New Media & Society*, 25(4), 867–887.